

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan karunia – Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Akhir Tahun Anggaran 2025 pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban dapat terselesaikan dengan baik.

LKjIP ini disusun dalam rangka memenuhi amanah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban tanggal 31 Desember 2025 Nomor : 000.8.6.3/10732/414.032/2025 perihal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025.

Selanjutnya, kepada semua aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban, kami sampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya atas seluruh upaya yang telah dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika selama kurun waktu Tahun 2025.

Tuban, 31 Desember 2025

Kepala Dinas  
Komunikasi dan Informatika,  
Statistik dan Persandian  
Kabupaten Tuban



**ARIF HANDOYO, SH, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661102 199603 1 003

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi yang disebabkan oleh beberapa hal. Beberapa hal terjadinya kesenjangan tersebut antara lain; keberagaman tingkat pendidikan masyarakat, budaya, dan kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur, Kondisi demikian tentu menjadi tugas negara dalam hal ini pemerintah untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi yakni melakukan pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat.

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi komunikasi dan informatika, statistik dan persandian tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang kominfo kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominfo yang dilaksanakan Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi *e-government* dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kabupaten Tuban. *E-government* yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan

meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua OPD.

## **1.2. Tugas, Fungsi dan Organisasi**

### **A. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 42 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dengan tipe A.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas membantu Bupati dalam fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan dukungan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- e. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
- f. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- g. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
- h. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban terdapat 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) bidang yang mempunyai tugas fungsi sebagai berikut :

#### 1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta penyusunan program dan laporan. Adapun fungsi yang diselenggarakan oleh Sekretaris sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan administrasi umum dan urusan rumah tangga;

- b. penyelenggaraan urusan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan bangunan serta fasilitas kantor;
- c. pelaksanaan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. pelaksanaan tugas-tugas yang menyangkut hukum dan ketatalaksanaan;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. penyelenggaraan administrasi keuangan;
- g. pelaksanaan penyusunan program dan laporan;
- h. pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- i. penyelenggaraan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- j. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- k. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik

Bidang komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam Menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang komunikasi dan informasi publik.

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang komunikasi dan informasi publik;
- b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang komunikasi dan informasi publik;
- c. pelaksanaan pengelolaan informasi publik dan komunikasi Pemerintah Daerah;

- d. pelaksanaan pengelolaan-pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- e. pelaksanaan pengelolaan penyediaan konten lintas sectoral;
- f. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang komunikasi dan informasi publik;
- g. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- h. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas melaksanakan merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang aplikasi informatika.

Bidang Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang aplikasi informatika;
- b. pelaksanaan koordinasi, pembinaa, pengawasan dan pengendalian di bidang aplikasi informatika;
- c. pelaksanaan pengelolaan manajemen data dan informasi *e-government*;
- d. pelaksanaan pengelolaan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi;
- e. pelaksanaan pengelolaan infrastruktur data informaiika dan keamanan informasi;
- f. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang aplikasi informatika;
- g. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;

- h. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Statistik dan persandian

Bidang Statistik Dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang statistik dan persandian.

Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang statistik dan persandian;
- b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang statistik dan persandian;
- c. pelaksanaan pengelolaan perencanaan, pengumpulan dan pemeriksaan data statistik sektoral;
- d. pelaksanaan pengelolaan penyebarluasan dan pemanfaatan data statistik sektoral;
- e. pelaksanaan pengelolaan persandian keamanan informasi;
- f. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang aplikasi informatika;
- g. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- h. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tuban

Nomor 42 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban. Hal ini sebagai tindak lanjut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta sebagai implementasi Program Prioritas Nasional Penyederhanaan Birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Meskipun dengan struktur organisasi yang sederhana namun diharapkan dapat lebih kaya fungsi sehingga capaian kinerja organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Adapun susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
- d. Bidang Aplikasi Informatika;
- e. Bidang Statistik dan Persandian; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang membawahi 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang yaitu Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika, dan Kepala Bidang Statistik dan Persandian.

Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan 1 (satu) Kepala Subbagian. Kepala Subbagian tersebut adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik berkedudukan dibawah Kepala Dinas dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional

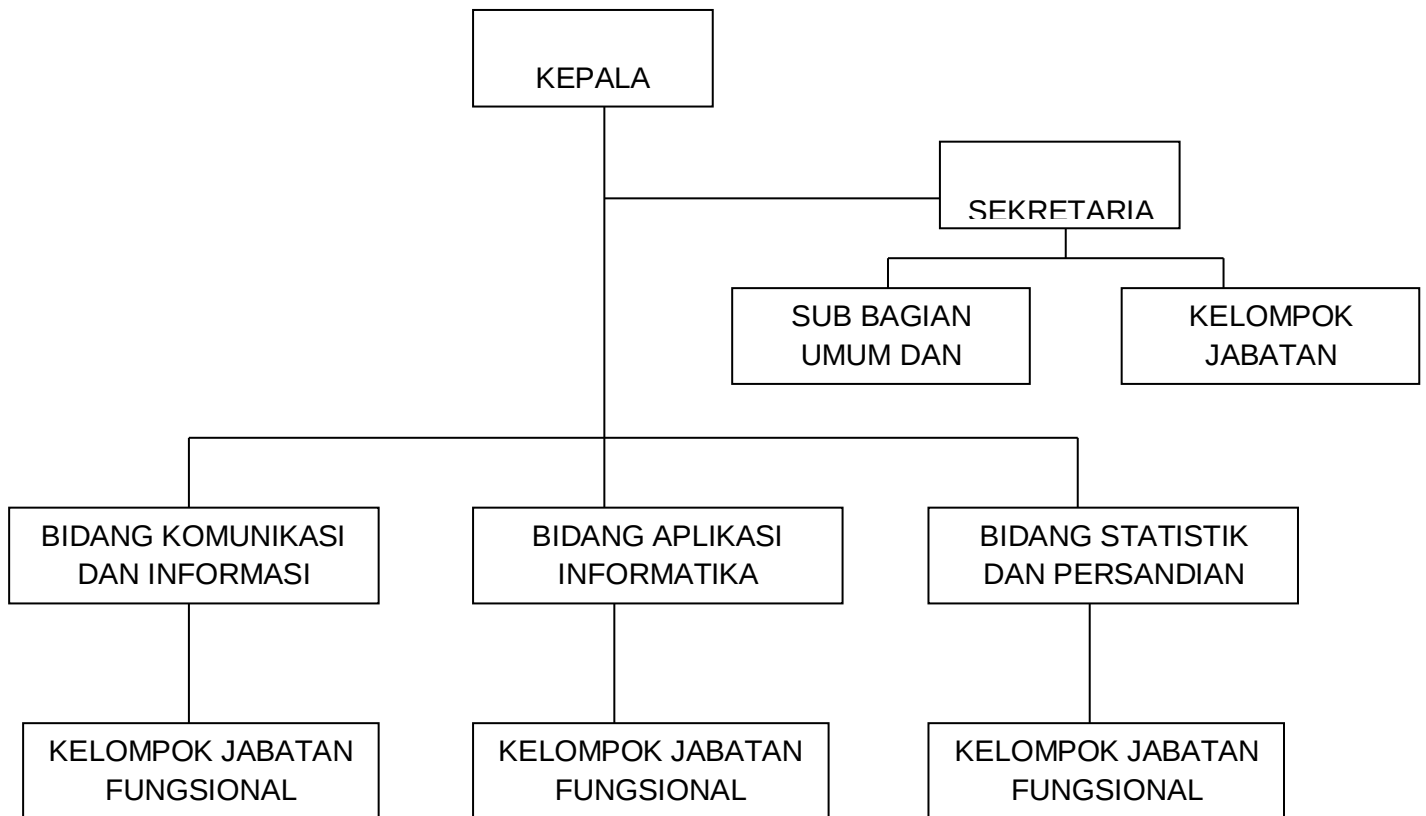
bidang Komunikasi dan Informasi Publik. Pada Bidang ini keseluruhan jabatan struktural eselon IV berubah menjadi Jabatan Fungsional.

Kepala Bidang Aplikasi Informatika berkedudukan dibawah Kepala Dinas dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional bidang Aplikasi Informatika. Pada Bidang ini keseluruhan jabatan struktural eselon IV berubah menjadi Jabatan Fungsional.

Kepala Bidang Statistik dan Persandian berkedudukan dibawah Kepala Dinas dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional bidang Statistik dan Persandian. Pada Bidang ini keseluruhan jabatan struktural eselon IV berubah menjadi Jabatan Fungsional.

Adapun struktur susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban dapat digambarkan dalam bagan gambar struktur sebagai berikut:

Gambar 1.2  
SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN TUBAN



### 1.3. Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

Pada Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian terdapat beberapa isu strategis, yaitu :

1. Peningkatan lembaga Pemerintah secara digital sampai ke Desa yang terbuka dan terintegrasi dalam pelayanan publik
2. Perlu peningkatan kapabilitas digital dalam pembuatan dan pengembangan Aplikasi dan TIK
3. Diperlukan data statistik sektoral yang valid dan update sebagai informasi dalam pengambilan kebijakan

#### **1.4. Landasan Hukum**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional. Perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun rencana strategis (Renstra OPD) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi OPD berpedoman pada Rencana Panjang Jangka Menengah ( RPJM ) daerah.

#### **2.1. RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban Tahun 2021 - 2026 merupakan acuan dalam membuat jadwal rencana kerja/kegiatan baik kegiatan yang bersifat rutin maupun proyek. Rencana Strategis Tahunan merupakan penjabaran dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam pelaksanaan kegiatan. Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021 -2026.

##### **2.1.1. Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026**

Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Mendukung Misi Kepala Daerah yang Ke-4, yaitu Memantapkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik, Profesional, Transparan, Akuntabel dan Sistem Pengawasan yang Efektif.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan persandian sampai pada akhir Tahun 2025 adalah Birokrasi yang Kapabel dan Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima. Kemudian Dinas komunikasi dan Informatika, Statistik dan

Persandian memiliki 2 (dua) sasaran yaitu Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informatika dengan indikator (1) Cakupan Layanan Sistem Jaringan TIK, dengan target 100 %. (2) Terintegrasinya Sistem Informasi di OPD, dengan target 80 %. (3) Prosentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan target 75%. Sasaran kedua yaitu Layanan Publik dan Meningkatnya pelayanan informasi publik dengan indikator Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan target 90 persen.

### **2.1.2. Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan persandian sampai pada akhir Tahun 2025 adalah Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital. Kemudian Dinas komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian memiliki 4 (empat) sasaran yaitu (1) Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital, dengan indikator Indeks Pemerintah Digital / Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik; (2) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektor, dengan indikator Indeks Pembangunan Statistik; (3) Meningkatnya Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah, dengan indikator Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah; (4) Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, diperlukan rumusan strategi yang ditetapkan berdasarkan identifikasi kelemahan dan kelebihan serta berbagai alternatif pelaksanaan Komunikasi dan Informatika, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan sistem pemerintahan daerah;
2. Meningkatkan Pengelolaan Layanan Keamanan Informasi;
3. Menyediakan data Statistik Sektor yang Valid dan Update;
4. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas pelayanan informasi publik.

Adapun dukungan rumusan kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana IT (Infrastruktur jaringan, database, aplikasi) untuk menerapkan kebijakan Bupati;
2. Menerapkan tren positif *E-Government* dan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai anggaran yang tersedia;
3. Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi secara Optimal;
4. Melaksanakan Pengolahan Data Statistik Sektorial yang sesuai Standar Data;
5. Meningkatkan Sistem layanan pengaduan masyarakat;
6. Memberikan Kepastian Tentang Kebenaran Informasi yang Beredar di Masyarakat;
7. Memberikan kemudahan dalam mengakses informasi publik yang Up To Date.

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan selama kurun waktu lima tahun (Tahun 2021-2026).

Penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 terdiri dari 5 program 11 kegiatan yang dijabarkan dalam 43 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan sebagai berikut:
  - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Lengkapannya
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Pemeliharaan Mebel
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan Kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Pengelolaan Media Komunikasi Publik
  - Pelayanan Informasi Publik
  - Relasi Media
  - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan Kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengelolaan E – government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Fasilitas penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda
  - Penyelenggara pusat kendali Pemerintah Daerah
  - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
  - Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
  - Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE
  - Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
  - Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
  - Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
  - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
  - Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi

- Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan Kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia
  - Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
  - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
  - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan Kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

## **2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Penyusunan perjanjian kinerja Tahun 2025 mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja 2025. Dimana dalam Perubahan Rencana Kerja 2025 terdapat perubahan sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Sehingga Perjanjian Kinerja Tahun 2025 di buat berdasarkan 2 (dokumen) Rencana Strategis yaitu Renstra 2021-2026 untuk Perjanjian Kinerja 2025 dan Renstra 2025-2029 untuk Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

### 2.2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Perencanaan Awal/Lama)

Penetapan kinerja tahunan tahun 2025 (Renstra 2021-2026) meliputi 2 (dua) sasaran strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 4 (empat) indikator kinerja beserta targetnya dan dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban dengan Bupati Tuban sebagai berikut :

Tabel 2.2.1  
Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2025  
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian  
Kabupaten Tuban

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                    | INDIKATOR KINERJA |                                                                                            | TARGET |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 1  | Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informatika serta Layanan Publik | 1.1               | Persentase Cakupan Layanan Sistem dan Jaringan TIK                                         | 100    | %    |
|    |                                                                                      | 1.2               | Terintegrasinya Sistem Informasi di OPD                                                    | 85     | %    |
|    |                                                                                      | 1.3               | Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah | 100    | %    |
| 2  | Meningkatnya Pelayanan Informasi Publik                                              | 2.1               | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat                                                           | 90,5   | Poin |

|   | PROGRAM                                               | ANGGARAN             | KETERANGAN |
|---|-------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 1 | Aplikasi Informatika                                  | Rp. 5.348.201.616,00 | APBD       |
| 2 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral                    | Rp. 272.910.640,00   | APBD       |
| 3 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | Rp. 235.107.903,00   | APBD       |

|        |                                                             |                       |      |
|--------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| 4      | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik         | Rp. 2.655.320.852,00  | APBD |
| 5      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 9.815.307.736,58  | APBD |
| JUMLAH |                                                             | Rp. 18.326.848.747,58 |      |

### 2.2.2 Review/Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029. Adapun didalam Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dengan pagu anggaran sebesar Rp. 18.741.348.099,00 selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 2.2.2 berikut :

Tabel 2.2.2  
Lampiran Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025  
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian  
Kabupaten Tuban

| NO | SASARAN STRATEGIS                                            | INDIKATOR KINERJA                                                                | TARGET |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital       | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Indeks Pemdi (Pemerintah Digital) | 4,29   |
| 2. | Meningkatnya Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah | Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah                          | 66,99  |
| 3. | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral     | Indeks Pembangunan Statistik (IPS)                                               | 2,45   |
| 4. | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan            | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah                                | 89,89  |

|    | PROGRAM                                                     |    | ANGGARAN         | KETERANGAN   |
|----|-------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------|
| 1. | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika                    | Rp | 7.910.822.798,50 | PAPBD        |
| 2. | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik         | Rp | 1.959.904.317,40 | PAPBD/DBHCHT |
| 3. | Program Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi | Rp | 61.117.612,50    | PAPBD        |
| 4. | Program Pengelolaan Statistik Sektoral                      | Rp | 188.516.570,00   | PAPBD        |

|                                                                |                             |       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| 5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp 8.620.986.800,60         | PAPBD |
| <b>JUMLAH</b>                                                  | <b>Rp 18.741.348.099,00</b> |       |

### 2.2.3 Ringkasan Perubahan PK Tahun 2025

Dalam revisi perjanjian kinerja Tahun 2025 yang menyesuaikan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2025-2029 terdapat penyesuaian sasaran strategis dimana awalnya terdapat 2 (dua) sasaran strategis, di rubah menjadi 4 (empat) sasaran strategis. Secara garis besar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban Tahun 2025 ringkasan perubahan perjanjian kinerja tahun 2025 sebagaimana tabel 2.2.3 berikut :

Tabel 2.2.3.1

#### Ringkasan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

| PK AWAL PERENCANAAN<br>(Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026) |                                                                                      |                                         | REVIEW/PERUBAHAN PK<br>(Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029) |         |           | KET.    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|
| No.                                                          | Sasaran                                                                              | Indikator                               | No.                                                          | Sasaran | Indikator |         |
| 1                                                            | Meningkatnya pelayanan informasi publik                                              | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat        |                                                              |         |           | Dihapus |
| 2                                                            | Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informatika serta Layanan Publik | Cakupan Layanan Sistem Jaringan TIK     |                                                              |         |           | Dihapus |
|                                                              |                                                                                      | Terintegrasinya Sistem Informasi di OPD |                                                              |         |           | Dihapus |

|  |  |                                                                                                                    |   |                                                                             |                                                                        |                   |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  |  | Prosentase<br>OPD yang<br>Menggunakan<br>Data Statistik<br>dalam<br>melakukan<br>Evaluasi<br>Pembangunan<br>Daerah |   |                                                                             |                                                                        | Dihapus           |
|  |  |                                                                                                                    | 1 | Terwujudnya<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik Berbasis<br>Digital          | Indeks Pemdi<br>/ Pemerintah<br>Digital                                | Indikator<br>Baru |
|  |  |                                                                                                                    | 2 | Meningkatnya<br>Kualitas<br>Penyelenggaraan<br>Statistik<br>Sektoral        | Indeks<br>Pembangunan<br>Statistik                                     | Indikator<br>Baru |
|  |  |                                                                                                                    | 3 | Meningkatnya<br>Kesiapan<br>Pengamanan<br>Informasi<br>Pemerintah<br>Daerah | Tingkat<br>Kesiapan<br>Pengamanan<br>Informasi<br>Pemerintah<br>Daerah | Indikator<br>Baru |
|  |  |                                                                                                                    | 4 | Meningkatnya<br>Kepuasan<br>Masyarakat<br>Terhadap<br>Layanan               | Indeks<br>Kepuasan<br>Masyarakat<br>(IKM)<br>Perangkat<br>Daerah       | Indikator<br>Baru |

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur

tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

- 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
- 2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
- 5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

### **Rencana Kerja Tahunan**

Rencana kinerja tahunan merupakan dokumen untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh instansi. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan. Hal tersebut untuk mewujudkan tercapainya target tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban Tahun 2025.

Tabel 2.2.3.2

IKU beserta formulasi dan target pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

| No | Kinerja Utama/sasaran Strategis                                       | Indikator Kinerja Utama (Satuan)                            | Formulasi Penghitngan                                                        | Target Tahun 2025 |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | Tujuan: Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital        | Indeks Pemdi / Pemerintah Digital (angka)                   | Nilai Indeks Pemdi (Pemerintah Digital)                                      | 4,29              |
| 2. | Sasaran: Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital       | Indeks Pemdi / Pemerintah Digital (angka)                   | Nilai Indeks Pemdi (Pemerintah Digital)                                      | 4,29              |
| 3. | Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral     | Indeks Pembangunan Statistik (Poin)                         | Nilai Indeks Pembangunan Statistik                                           | 2,25              |
| 4. | Sasaran: Meningkatnya Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah | Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (%) | Nilai Indeks Kami Hasil Verifikasi / Nilai Optimal Indeks Kami (918) X 100 % | 66,99             |
| 5. | Sasaran: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan            | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (angka)   | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah                      | 89,89             |

Tabel 2.2.3.3

Program dan Pagu Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika,  
Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban

| No        | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                   | Anggaran                     | Keterangan |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| <b>A</b>  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>BIDANG KOMUNIKASI DAN<br/>INFORMATIKA</b>            | <b>18.741.348.099</b>        |            |
| <b>1.</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>      | <b>8.566.986.800,6<br/>0</b> |            |
| <b>a.</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran,<br/>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br/>Daerah</b> | <b>92.275.200</b>            |            |
|           | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah                              | 76.342.700                   |            |
|           | Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                            | 15.932.500                   |            |
| <b>b.</b> | <b>Administrasi Keuangan<br/>Perangkat Daerah</b>                               | <b>6.463.256.797</b>         |            |
|           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                            | 6.380.514.797                |            |
|           | Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                | 62.400.000                   |            |
|           | Koordinasi dan Pelaksanaan<br>Akuntansi SKPD                                    | 20.342.000                   |            |
| <b>c.</b> | <b>Administrasi Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>                            | <b>19.976.000</b>            |            |
|           | Pengadaan Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapannya                       | 976.000                      |            |
|           | Pendidikan dan Pelatihan<br>Pegawai Berdasarkan Tugas dan<br>Fungsi             | 19.000.000                   |            |
| <b>d.</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat<br/>Daerah</b>                                   | <b>529.056.749</b>           |            |

| No<br>.   | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                      | Anggaran                | Keterangan |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
|           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 10.254.000              |            |
|           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 45.415.511              |            |
|           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 49.709.150              |            |
|           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 20.125.000              |            |
|           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | 12.830.880              |            |
|           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 79.746.951              |            |
| <b>e.</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            | <b>379.107.975,58</b>   |            |
|           | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 379.107.975,58          |            |
| <b>f.</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>1.128.887.975,02</b> |            |
|           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 1.481.500               |            |
|           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 311.054.133             |            |
|           | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | 58.772.752,02           |            |
|           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 757.579.590             |            |
| <b>g.</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>265.401.361</b>      |            |
|           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 66.213.566              |            |

| No        | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                    | Anggaran                | Keterangan |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
|           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 92.422.495              |            |
|           | Pemeliharaan Mebel                                                                                               | 14.960.000              |            |
|           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | 91.805.300              |            |
| <b>2.</b> | <b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>                                                                   | <b>2.007.904.317,40</b> |            |
| <b>a.</b> | <b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                              | <b>2.007.904.317,40</b> |            |
|           | Relasi Media                                                                                                     | 530.574.904             |            |
|           | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat                                                       | 168.775.604             |            |
|           | Pelayanan Informasi Publik                                                                                       | 156.955.218,40          |            |
|           | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                              | 4.690.700               |            |
| <b>3.</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>                                                                  | <b>5.796.611.234</b>    |            |
| <b>a.</b> | <b>Pengelolaan E-goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                                       | <b>5.796.611.234</b>    |            |
|           | Fasilitas penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda                                                               | 41.949.000              |            |
|           | Penyelenggara pusat kendali Pemerintah Daerah                                                                    | 22.934.354              |            |
|           | Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi                                                                        | 91.776.875              |            |
|           | Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah                          | 45.300.000              |            |

| No<br>.   | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                           | Anggaran           | Keterangan |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
|           | Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE                                                                                   | 45.300.000         |            |
|           | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah | 1.302.650.667,50   |            |
|           | Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah                                                       | 24.745.400         |            |
|           | Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas                                                    | 22.574.992         |            |
|           | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota                                                               | 6.233.200.000      |            |
|           | Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi                                             | 58.246.617         |            |
|           | Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas                            | 24.144.893         |            |
| <b>B.</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>                                                                             | <b>192.516.570</b> |            |
| <b>1.</b> | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>                                                                       | <b>192.516.570</b> |            |
| <b>a.</b> | <b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>                                              | <b>192.516.570</b> |            |
|           | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral                                                                    | 31.441.500         |            |
|           | Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral                                                                            | 19.547.500         |            |

| No<br>.   | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                     | Anggaran              | Keterangan |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
|           | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia                                 | 133.104.410           |            |
|           | Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Sandar                                                        | 8.423.160             |            |
| <b>C.</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>BIDANG PERSANDIAN</b>                                                                  | <b>61.117.612,50</b>  |            |
| <b>1.</b> | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGARAAN<br/>PERSANDIAN UNTUK<br/>PENGAMANAN INFORMASI</b>                                  | <b>61.117.612,50</b>  |            |
| <b>a.</b> | <b>Penyelenggaraan Persandian<br/>untuk Pengamanan Informasi<br/>Pemerintah Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b>         | <b>61.117.612,50</b>  |            |
|           | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 52.875.500            |            |
|           | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik            | 8.245.112,50          |            |
|           | <b>Jumlah</b>                                                                                                     | <b>18.741.348,099</b> |            |

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian target indikator kinerja SKPD pada urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian menunjukkan keberhasilan pembangunan pada urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang telah dilaksanakan selama tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam rangka menunjang pencapaian misi Kabupaten Tuban yang meliputi Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital dengan sasaran (1) Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital, dengan indikator Indeks Pemerintah Digital / Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik; (2) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan indikator Indeks Pembangunan Statistik; (3) Meningkatnya Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah, dengan indikator Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah; (4) Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Menindaklanjuti visi, misi, dan arah kebijakan Bupati Tuban, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan mengacu kepada Misi ke-4, yaitu memantapkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dengan prinsip akuntabilitas, responsivitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.1.  
Capaian Kinerja s/d Triwulan III  
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten  
Tuban Tahun 2025

| No. | Sasaran                                 | Indikator                        | Target Kinerja | Pagu Anggaran (Rp) | Capaian Kinerja (s/d TW III) | Realisasi Anggaran (s/d TW III) | Program / Kegiatan                                              | Kegiatan yang Telah Dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Meningkatnya pelayanan informasi publik | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat | 90,5           | Rp. 2.655.320.852  | 0                            | Rp. 1.954.722.929               | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah</li> <li>• Memverifikasi kebenaran informasi</li> <li>• Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan data pengaduan secara terintegrasi</li> </ul> |
|     |                                         |                                  |                |                    |                              |                                 | Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah | <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | Daerah<br>Kabupat<br>en/Kota                                          |                                                                                                                                                                                                   |
|  |  |  |  |  |  |  | Pengelol<br>aan<br>Media<br>Komuni<br>kasi<br>Publik                  | Melaksanakan<br>operasional<br>Lembaga<br>Penyiaran<br>Publik Lokal<br>(LPPL) Radio<br>Pradya Suara                                                                                               |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelayan<br>an<br>Informa<br>si Publik                                 | Melaksanakan<br>sosialisasi<br>PPID,<br>pengisian<br>website serta<br>pengadaan<br>video mapping                                                                                                  |
|  |  |  |  |  |  |  | Relasi<br>Media                                                       | Melaksanakan<br>Pendokument<br>asian kegiatan<br>kedinasan<br>Pimpinan<br>Daerah serta<br>publikasi,<br>belanja iklan<br>di media<br>massa dan<br>untuk meliput<br>kegiatan<br>Pimpinan<br>Daerah |
|  |  |  |  |  |  |  | Kemitra<br>an<br>Komuni<br>kasi<br>dengan<br>Komunit<br>as<br>Informa | Pembinaan<br>Kelompok<br>Informasi<br>Masyarakat                                                                                                                                                  |

|   |                                                                                      |                                          |     |                      |     |                   |                                                                       |                                                                                                                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|----------------------|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                      |                                          |     |                      |     |                   | si<br>Masyara<br>kat                                                  |                                                                                                                                                              |
| 2 | Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informatika serta Layanan Publik | Cakupan Layanan Sistem Jaringan TIK      | 100 | Rp. 5.857.728.846,50 | 100 | Rp. 5.746.325.885 | • Program Pengelolaan Aplikasi Informatika                            | • perencanaan, pengembangan, implementasi, pemeliharaan, dan evaluasi sistem berbasis elektronik untuk mendukung tata kelola e-government dan layanan publik |
|   |                                                                                      | Terintegrasi nya Sistem Informasi di OPD | 75  |                      | 50  |                   |                                                                       |                                                                                                                                                              |
|   |                                                                                      |                                          |     |                      |     |                   | Pengelola E-governme nt di Lingkup Pemerin tah Daerah Kabupat en/Kota |                                                                                                                                                              |
|   |                                                                                      |                                          |     |                      |     |                   | Fasilitas penyele nggara SPBE di Lingkup Pemda                        | menyusun Rencana Induk penyelenggara an SPBE/Indeks                                                                                                          |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                       |                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                       | Pemerintah Digital                                                                                            |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyele<br>nggaraa<br>n Pusat<br>Kendali<br>Pemerin<br>tah<br>Daerah                                                                  | Pengembanga<br>n dan<br>pengelolaan<br>sistem<br>informasi<br>Tuban Data<br>Center dan<br>pengadaan<br>server |
|  |  |  |  |  |  |  | Koordin<br>asi<br>Pengelol<br>aan<br>Data<br>dan<br>Infomasi                                                                          | Pengintegrasia<br>n Aplikasi                                                                                  |
|  |  |  |  |  |  |  | Koordin<br>asi<br>Penyusu<br>nan<br>dan/<br>atau<br>rivi<br>arsitekt<br>ur dan<br>peta<br>rencana<br>SPBE<br>Pemerin<br>tah<br>Daerah | penyusunan<br>kerangka<br>dasar<br>penerapan<br>SPBE/Indeks<br>Pemerintah<br>Digital                          |
|  |  |  |  |  |  |  | Koordin<br>asi<br>Pelaksa<br>naan<br>Manaje                                                                                           | Sosialisasi dan<br>koordinasi<br>pelaksanaan<br>SPBE di<br>lingkup<br>Pemerintah                              |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                         |                                                                       |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | men<br>SPBE                                                                                                             | Kabupaten<br>Tuban                                                    |
|  |  |  |  |  |  |  | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah | Pembangunan dan pengembangan aplikasi sesuai kebutuhan/permintaan OPD |
|  |  |  |  |  |  |  | Koordinasi Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah daerah                                                       | Penyusunan Rencana Induk SPBE                                         |
|  |  |  |  |  |  |  | Koordinasi dan Fasilitas Penyele nggaraan Kabupat                                                                       | sosialisasi website desa dan produk Kominfo ke masyarakat             |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                      |                                                                                 |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | en atau Kota Cerdas                                                                                                  |                                                                                 |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyele<br>nggaraa<br>n<br>Jaringa<br>n Intra<br>Pemerin<br>tah<br>Daerah<br>Kab/Kot<br>a                            | Pemeliharaan Jaringan intra pemerintah daerah di seluruh OPD se Kabupaten Tuban |
|  |  |  |  |  |  |  | Koordin<br>asi<br>Pemanfa<br>atan<br>Portal<br>Pelayan<br>an<br>Pemerin<br>tah<br>Daerah<br>yang<br>Terinteg<br>rasi | Pengintegrasia<br>n Sisitem<br>Informasi                                        |
|  |  |  |  |  |  |  | Impleme<br>ntasi<br>Inovasi<br>Program<br>Kota<br>Cerdas<br>sesuai<br>dengan<br>Masterpl<br>an<br>Kabupat<br>en atau | sosialisasi<br>untuk<br>meningkatkan<br>pengetahuan<br>TIK<br>masyarakat        |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | Kota Cerdas                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |
|  |  |  |  |  |  |  | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) berdasarkan standar internasional</li> <li>• Penanganan serangan insiden Siber</li> </ul> |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                          |                                                                                                                                                                                          |
|  |  |  |  |  |  |  | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Perumusan kebijakan tentang keamanan informasi                                                                                                                                           |

|  |  |                                                                                            |     |                 |       |                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                            |     |                 |       |                 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Pembentukan tim penanganan insiden serangan siber dan penerbitan Tanda Tangan Elektronik serta mengintegrasikan Tanda Tangan Elektronik dengan aplikasi Pemerintah Daerah.                                                                                    |
|  |  | Prosentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah | 100 | Rp. 272.910.640 | 52.38 | Rp. 144.507.200 | Program Penyele nggaraan Statistik Sektoral                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan Pengumpulan dan Pengelolaan Data Statistik sektoral</li> <li>• Pelatihan bagi petugas lapangan atau pengelola data mengenai metodologi dan pengolahan data statistik bekerja sama dengan BPS</li> </ul> |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                          |                                                                                                       |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | Penyele<br>nggaraa<br>n<br>Statistik<br>Sektoral<br>di<br>Lingkup<br>Daerah<br>Kabupat<br>en/Kota                        | •                                                                                                     |
|  |  |  |  |  |  |  | Peningk<br>atan<br>Kualitas<br>Data<br>Statistik<br>Sektoral                                                             | pengintegrasia<br>n data statistik<br>sektoral<br>Kabupaten<br>Tuban                                  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyele<br>nggaraa<br>n<br>Statistik<br>Sektoral<br>yang<br>sesuai<br>dengan<br>Prinsip<br>Satu<br>Data<br>Indonesi<br>a | Pemetaan<br>Data Statistik<br>sektoral sesuai<br>dengan<br>standar data                               |
|  |  |  |  |  |  |  | Peningk<br>atan<br>Kapasita<br>s<br>Kelemba<br>gaan<br>Statistik<br>Sektoral                                             | Pembinaan<br>Desa Cinta<br>Statistik yang<br>bekerjasama<br>dengan BPS<br>Kab. Tuban                  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelaksa<br>naan<br>Proses<br>Bisnis<br>Statistik<br>Sektoral                                                             | Penyusunan<br>Sistem<br>Informasi Data<br>Statistik<br>Khusus Data-<br>data Statistik<br>yang terbagi |

|  |  |  |  |  |  |  |                |                                             |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------|---------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | Sesuai Standar | dalam Kecamatan Dalam Angka di 20 Kecamatan |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------|---------------------------------------------|

**3.1.1.Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Tabel 3.1.1.

Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban Tahun 2025

| NO | TUJUAN/SASARAN STRATEGIS                                              | INDIKATOR KINERJA                                           | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 1. | Tujuan: Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital        | Indeks Pemdi / Pemerintah Digital (angka)                   | 4,29   | 4,24      | 99%       |
| 2. | Sasaran: Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital       | Indeks Pemdi / Pemerintah Digital (angka)                   | 4,29   | 4,24      | 99%       |
| 3. | Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral     | Indeks Pembangunan Statistik (Poin)                         | 2,25   | 2,25      | 100%      |
| 4. | Sasaran: Meningkatnya Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah | Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (%) | 66,99  | 66,99     | 100%      |
| 5. | Sasaran: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan            | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (angka)   | 89,89  |           |           |

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025

**3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja atas capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Tabel 3.1.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Beberapa Tahun Terakhir

|  |  |           |        |           |           |
|--|--|-----------|--------|-----------|-----------|
|  |  | Indikator | Target | Realisasi | % Capaian |
|--|--|-----------|--------|-----------|-----------|

| No | Tujuan/Sasaran                                                                       |                                                                                            | 2022  | 2023  | 2025 | 2022  | 2023  | 2025  | 2022 | 2023 | 2025 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 1  | Meningkatnya pelayanan informasi publik                                              | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat                                                           | 77.01 | 80.01 | 90   | 87.53 | 88    | 99.12 | 114  | 110  | 110  |
| 2  | Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informatika serta Layanan Publik | Cakupan Layanan Sistem Jaringan TIK                                                        | 100   | 100   | 100  | 100   | 100   | 100   | 100  | 100  | 100  |
|    |                                                                                      | Terintegrasinya Sistem Informasi di OPD                                                    | 50    | 55    | 80   | 75    | 66    | 92.59 | 150  | 120  | 115  |
|    |                                                                                      | Prosentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah | 25    | 50    | 75   | 26.19 | 52.38 | 95.24 | 105  | 105  | 126  |
| 3  | Tujuan: Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital                       | Indeks Pemdi / Pemerintah Digital (angka)                                                  |       |       | 4,29 |       |       | 4,24  |      |      | 99%  |

|   |                                                                                         |                                                                             |  |  |           |  |  |           |  |  |          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|----------|
| 4 | Sasaran:<br>Terwujudnya<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik Berbasis<br>Digital          | Indeks<br>Pemdi /<br>Pemerintah<br>Digital<br>(angka)                       |  |  | 4,29      |  |  | 4,24      |  |  | 99%      |
| 5 | Sasaran:<br>Meningkatnya<br>Kualitas<br>Penyelenggaraa<br>n Statistik<br>Sektoral       | Indeks<br>Pembanguna<br>n Statistik<br>(Poin)                               |  |  | 2,25      |  |  | 2,25      |  |  | 100<br>% |
| 6 | Sasaran:<br>Meningkatnya<br>Kesiapan<br>Pengamanan<br>Informasi<br>Pemerintah<br>Daerah | Tingkat<br>Kesiapan<br>Pengamanan<br>Informasi<br>Pemerintah<br>Daerah (%)  |  |  | 66,9<br>9 |  |  | 66,9<br>9 |  |  | 100<br>% |
| 7 | Sasaran:<br>Meningkatnya<br>Kepuasan<br>Masyarakat<br>Terhadap<br>Layanan               | Indeks<br>Kepuasan<br>Masyarakat<br>(IKM)<br>Perangkat<br>Daerah<br>(angka) |  |  | 89,8<br>9 |  |  |           |  |  |          |

**3.1.3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Tabel 3.1.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | sat   | Target Renstra Tahun ke- |       |       |       |       | Realisasi Capaian Tahun ke- |   |   |   |   | Rasio Capain pada Tahun ke- |   |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|---|
|    |                                                            |       | 1                        | 2     | 3     | 4     | 5     | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1  | Indeks Pemdi / Pemerintah Digital                          | angka | 4,29                     | 1,81  | 1,91  | 2,01  | 2,1   | 4,24                        | - | - | - | - | 99%                         | - | - | - | - |
| 2  | Indeks Pembangunan Statistik                               | point | 2,45                     | 2,65  | 2,85  | 3     | 3,1   | 2,25                        | - | - | - | - | 100%                        | - | - | - | - |
| 3  | Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah    | %     | 66,99                    | 68,08 | 70,81 | 80,07 | 81,7  | 66,99                       | - | - | - | - | 100%                        | - | - | - | - |
| 4  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah          | angka | 89,89                    | 90,39 | 90,89 | 91,39 | 91,89 | -                           | - | - | - | - | -                           | - | - | - | - |

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka  
Menengah

| No<br>. | Sasaran                                                                                 | Indikator Sasaran                                                       | Realisas<br>i Tahun<br>2025 | Target<br>Akhir<br>Renstra | Tingkat Kemajuan |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|
| 1.      | Tujuan:<br>Terwujudnya<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik Berbasis<br>Digital           | Indeks Pemdi /<br>Pemerintah Digital<br>(angka)                         | 4,24                        | 2,1                        |                  |
| 2.      | Sasaran:<br>Terwujudnya<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik Berbasis<br>Digital          | Indeks Pemdi /<br>Pemerintah Digital<br>(angka)                         | 4,24                        | 2,1                        |                  |
| 3.      | Sasaran:<br>Meningkatnya<br>Kualitas<br>Penyelenggaraa<br>n Statistik<br>Sektoral       | Indeks<br>Pembangunan<br>Statistik (Poin)                               | 2,25                        | 3,1                        |                  |
| 4.      | Sasaran:<br>Meningkatnya<br>Kesiapan<br>Pengamanan<br>Informasi<br>Pemerintah<br>Daerah | Tingkat Kesiapan<br>Pengamanan<br>Informasi<br>Pemerintah Daerah<br>(%) | 66,99                       | 81,7                       |                  |
| 5.      | Sasaran:<br>Meningkatnya<br>Kepuasan<br>Masyarakat<br>Terhadap<br>Layanan               | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)<br>Perangkat Daerah<br>(angka)      |                             | 91,89                      |                  |

**3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Organisasi lain yang setipe/Provinsi/Nasional (Benchmark Kinerja)**

| Indikator                                                   | Capaian Kinerja  |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                             | Perangkat Daerah | Organisasi lain yang setipe/Provinsi/Nasional (Benchmark Kinerja) |
| Indeks Pemdi / Pemerintah Digital (angka)                   | 4,24             |                                                                   |
| Indeks Pembangunan Statistik (Poin)                         | 2,25             |                                                                   |
| Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (%) | 66,99            |                                                                   |
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (angka)   |                  |                                                                   |

**3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

- a. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Sasaran Strategis ke 1 yaitu Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital dengan indikator Indeks Pemerintah Digital / Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik ditargetkan mencapai 4,29 point pada tahun 2025 tidak diadakan penilaian oleh Kemenpan RB karena adanya efisiensi. Indeks Pemerintah Digital atau yang dulu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis serta hal - hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Keuntungan yang paling diharapkan dari *e-government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Untuk meningkatkan kualitas Sistem informasi dalam mendukung perbaikan kualitas pelayanan

publik. Pada tahun 2024 Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik mencapai 4,24. Sasaran Strategis yang ke 2 yaitu Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan indikator Indeks Pembangunan Statistik yang di targetkan mencapai 2,45 pada tahun ini tidak dilaksanakan penilaian oleh BPS. Sasaran Strategis yang ke 3 yaitu Meningkatnya Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah, dengan indikator Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dengan capaian kinerja mencapai 100%. Sasaran Strategis yang ke 4 yaitu Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah digunakan di berbagai kehidupan masyarakat untuk membantu meningkatkan kinerja mereka. Tuntutan penggunaan TIK di lingkungan instansi pemerintah untuk menyelesaikan tugas-tugas internal dan memberikan layanan masyarakatpun semakin besar. Karena dengan mengoptimalkan TIK ekspektasi masyarakat terhadap kinerja dan layanan pemerintah yang lebih baik, akuntabel dan transparan bisa terwujud, sehingga tatakelola pemerintahan yang baik atau “*good governance*” bisa direalisasikan.

- b. Upaya nyata dan/atau hambatannya atas pencapaian kinerja
- Untuk mencapai keberhasilan kinerja ada beberapa upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban, diantaranya :

1. Melaksanakan Publikasi Pembangunan Daerah baik melalui media sosial, elektronik dan cetak
2. Melaksanakan peningkatan indeks Pemerintah Digital dalam rangka mendukung transformasi digital
3. Melaksanakan pembuatan dan pengembangan aplikasi sesuai kebutuhan
4. Melaksanakan pengintegrasian sistem informasi
5. Bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik dalam melaksanakan pembinaan terhadap aparatur desa untuk meningkatkan kompetensi dalam memanfaatkan data statistik sektoral
6. Melaksanakan pemetaan data statistik sektoral
7. Melaksanakan pengamanan jaringan dan system informasi pemerintah Kabupaten Tuban

- c. Alternatif solusi atas upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Selain melaksanakan upaya diatas yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban juga melakukan upaya alternatif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yaitu :

1. Melaksanakan Interoperabilitas digital layanan publik di Instansi Pemerintah sampai ke Desa
2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi oleh perangkat Pemerintah sampai ke Desa
3. Optimalisasi penyelenggaraan validasi dan updating data statistik sektoral secara menyeluruh
4. Meningkatkan penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui website secara berkelanjutan
5. Mendokumentasikan kegiatan kedinasan Pimpinan Daerah serta publikasi kegiatan Pimpinan Daerah di media massa
6. Melaksanakan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat yang ada di Kecamatan
7. Pemenuhan Indikator penilaian Indeks SPBE sehingga predikat SPBE meningkat.

### **3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;**

| No. | Tujuan/ Sasaran                                                   | Indikator Kinerja                         | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1   | 2                                                                 | 3                                         | 4              | 5                 | 6                 | 7                     | 8                 |
| 1.  | Tujuan:<br>Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital | Indeks Pemdi / Pemerintah Digital (angka) | 4,29           | 4,24              | 99%               | 92,21%                | 7,79%             |
| 2.  | Sasaran:<br>Terwujudnya Kualitas Pelayanan                        | Indeks Pemdi / Pemerintah Digital (angka) | 4,29           | 4,24              | 99%               | 97,94%                | 2,06%             |

|    |                                                                          |                                                             |       |       |      |        |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|------|--------|--------|
|    | Publik Berbasis Digital                                                  |                                                             |       |       |      |        |        |
| 3. | Sasaran:<br>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral     | Indeks Pembangunan Statistik (Poin)                         | 2,25  | 2,25  | 100% | 75,06% | 24,94% |
| 4. | Sasaran:<br>Meningkatnya Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah | Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (%) | 66,99 | 66,99 | 100% | 93,64% | 6,36%  |
| 5. | Sasaran:<br>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan            | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (angka)   | 89,89 |       |      | 87,97% | 12,03% |

### **3.1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut :

#### **3.1.7.1. Urusan Komunikasi Dan Informatika**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam bidang informatika dan komunikasi yang disebabkan oleh beberapa hal. Beberapa hal terjadinya kesenjangan tersebut antara lain; keberagaman tingkat pendidikan masyarakat, budaya, dan kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur, Kondisi demikian tentu menjadi tugas negara dalam hal ini pemerintah untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi atau berita yang dibutuhkan.

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi komunikasi dan informatika tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang komunikasi dan informatika kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominfo yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kabupaten Tuban. *E-government* yang dimaknai sebagai penyelenggaraan

kepemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua OPD.

#### 3.1.7.2. Urusan Statistik

Penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar Statistik di Kabupaten Tuban dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Pada Tahun 2025, diarahkan untuk pengembangan Sistem Informasi Data Statistik dan Dokumen Data Statistik Sektoral sebagai pendukung perencanaan pembangunan daerah.

#### 3.1.7.3. Urusan Persandian

Penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar Persandian di Kabupaten Tuban dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Pada Tahun 2025, diarahkan untuk Peningkatan Sistem Informasi yang menerapkan Manajemen Keamanan Informasi.

### **3.2. Realisasi Anggaran**

#### A. Realisasi Anggaran Beserta Hasil Yang Dicapai Tahun 2025

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana uraian diatas, dapat direalisasikan dengan beberapa tolok ukur diantaranya indikator hasil kegiatan. Adapun rekapitulasi realisasi program dan kegiatan pada urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.2.1

Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten  
Tuban

| <b>Perangkat Daerah/Nama<br/>Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>             | <b>Anggaran (Rp)</b>    | <b>Realisasi (Rp)</b> | <b>%</b>     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>DINAS KOMUNIKASI DAN<br/>INFORMATIKA, STATISTIK DAN<br/>PERSANDIAN</b>   | <b>18.741.348.099</b>   | <b>17.280.510.701</b> | <b>92,21</b> |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG<br/>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>            | <b>18.741.348.099</b>   | <b>17.280.510.701</b> | <b>92,21</b> |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN<br/>PEMERINTAHAN DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b>  | <b>8.566.986.800,60</b> | <b>7.536.230.588</b>  | <b>87,97</b> |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan<br/>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>92.275.200</b>       | <b>67.110.480</b>     | <b>72,73</b> |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                          | 76.342.700              | 54.673.980            | 71,62        |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                           | 15.932.500              | 12.436.500            | 78,06        |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat<br/>Daerah</b>                           | <b>6.463.256.797</b>    | <b>5.766.348.285</b>  | <b>89,22</b> |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                           | 6.380.514.797           | 5.699.497.595         | 89,33        |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan<br>Tugas ASN                            | 62.400.000              | 46.800.000            | 75,00        |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi<br>SKPD                                | 20.342.000              | 20.500.690            | 98,57        |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat<br/>Daerah</b>                        | <b>19.976.000</b>       | <b>19.660.000</b>     | <b>98,42</b> |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapannya                   | 976.000                 | 960.000               | 98,36        |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan Fungsi            | 19.000.000              | 18.700.000            | 98,42        |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                   | <b>529.056.749</b>      | <b>503.310.025</b>    | <b>95,13</b> |
| Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor         | 10.254.000              | 10.254.000            | 100          |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan<br>Kantor                             | 45.415.511              | 44.037.699            | 96,97        |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                            | 49.709.150              | 43.940.300            | 88,39        |
| Penyediaan Barang Cetak dan<br>Penggandaan                                  | 20.125.000              | 20.100.000            | 99,88        |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan                 | 12.830.880              | 10.503.000            | 81,86        |

| <b>Perangkat Daerah/Nama<br/>Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>                                                    | <b>Anggaran (Rp)</b>         | <b>Realisasi (Rp)</b> | <b>%</b>     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 79.746.951                   | 74.804.000            | 93,80        |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                        | <b>379.107.975,58</b>        | <b>358.452.300</b>    | <b>94,55</b> |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 379.107.975,58               | 358.452.300           | 94,55        |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>                                                    | <b>1.128.887.975,0<br/>2</b> | <b>891.264.842</b>    | <b>78,95</b> |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 1.481.500                    | 1.429.700             | 96,50        |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 311.054.133                  | 208.349.850           | 66,98        |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | 58.772.752,02                | 39.040.250            | 66,43        |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 757.579.590                  | 642.445.024           | 84,80        |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan Pemerintahan<br/>Daerah</b>                               | <b>265.401.361</b>           | <b>229.755.700</b>    | <b>86,57</b> |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 66.213.566                   | 61.456.700            | 92,82        |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 92.422.495                   | 90.640.000            | 98,07        |
| Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | 14.960.000                   | 5.500.000             | 36,76        |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 91.805.300                   | 72.159.000            | 78,60        |
| <b>PROGRAM INFORMASI DAN<br/>KOMUNIKASI PUBLIK</b>                                                                 | <b>2.007.904.317,4<br/>0</b> | <b>1.954.722.929</b>  | <b>97,55</b> |
| <b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi<br/>Publik Pemerintah Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b>                        | <b>2.007.904.317,4<br/>0</b> | <b>1.954.722.929</b>  | <b>97,55</b> |
| Relasi Media                                                                                                       | 530.574.904                  | 522.908.821           | 98,56        |
| Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat                                                         | 168.775.604                  | 153.898.166           | 91,19        |
| Pelayanan Informasi Publik                                                                                         | 156.955.218,40               | 155.449.837           | 99,04        |
| Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                                | 4.690.700                    | 4.605.018             | 98,17        |
| <b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>                                                                                | <b>5.796.611.234</b>         | <b>5.689.094.885</b>  | <b>98,15</b> |
| <b>Pengelolaan E-government di Lingkup<br/>Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                                    | <b>5.796.611.234</b>         | <b>5.689.094.885</b>  | <b>98,15</b> |
| Fasilitas penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda                                                                 | 41.949.000                   | 17.797.800            | 42,43        |

| <b>Perangkat Daerah/Nama<br/>Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>                                                         | <b>Anggaran (Rp)</b> | <b>Realisasi (Rp)</b> | <b>%</b>     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Penyelenggara pusat kendali Pemerintah Daerah                                                                           | 22.934.354           | 18.672.500            | 81,42        |
| Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi                                                                               | 91.776.875           | 90.571.500            | 98,69        |
| Koordinasi penyusunan dan/atau rewiu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah                                 | 45.300.000           | 3.918.000             | 8,65         |
| Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE                                                                                   | 45.300.000           | 35.265.500            | 77,85        |
| Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah | 1.302.650.667,50     | 1.296.538.080         | 99,53        |
| Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah                                                       | 24.745.400           | 2.396.000             | 9,68         |
| Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas                                                    | 22.574.992           | 11.214.000            | 49,67        |
| Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota                                                               | 6.233.200.000        | 6.052.788.598         | 97,11        |
| Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi                                             | 58.246.617           | 47.591.500            | 81,71        |
| Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas                            | 24.144.893           | 11.065.506            | 45,83        |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>                                                                             | <b>192.516.570</b>   | <b>144.507.200</b>    | <b>75,06</b> |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>                                                                       | <b>192.516.570</b>   | <b>144.507.200</b>    | <b>75,06</b> |
| <b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>                                              | <b>192.516.570</b>   | <b>144.507.200</b>    | <b>75,06</b> |
| Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral                                                                    | 31.441.500           | 19.517.500            | 62,08        |
| Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral                                                                            | 19.547.500           | 13.703.500            | 71,10        |
| Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia                                       | 133.104.410          | 103.518.200           | 77,77        |
| Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar                                                             | 8.423.160            | 7.768.000             | 92,22        |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>                                                                            | <b>61.117.612,50</b> | <b>57.231.000</b>     | <b>93,64</b> |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>                                                    | <b>61.117.612,50</b> | <b>57.231.000</b>     | <b>93,64</b> |

| <b>Perangkat Daerah/Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>                                                       | <b>Anggaran (Rp)</b> | <b>Realisasi (Rp)</b> | <b>%</b>     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                     | <b>61.117.612,50</b> | <b>57.231.000</b>     | <b>93,64</b> |
| Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 52.875.500           | 49.881.500            | 94,34        |
| Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik            | 8.245.112,50         | 7.349.500             | 89.14        |

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Tuban Tahun 2025*

Adapun Rincian Penggunaan Sebagai Berikut :

a. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominfo yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi *e-government* dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kabupaten Tuban. *E-government* yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan

teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua OPD.

Dalam urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Tuban dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandiann.

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, dengan anggaran sebesar Rp 18.741.348.099,00 dan terealisasi sebesar Rp 17.280.510.701,00 atau 92,21%. Dengan indikator kinerja yaitu :

1. Indeks Pemerintah Digital / Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik ditargetkan mencapai 4,29 point pada tahun 2025 tidak diadakan penilaian oleh Kemenpan RB karena adanya efisiensi.
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektor, dengan indikator Indeks Pembangunan Statistik yang di targetkan mencapai 2,45 pada tahun ini tidak dilaksanakan penilaian oleh BPS.
3. Meningkatnya Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah, dengan indikator Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dengan capaian kinerja mencapai 100%.
4. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

Adapun rincian program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan persandian sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik dengan kegiatan:
  - a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan rincian sub kegiatan:
    - 1) Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan alokasi dana sebesar Rp 555.087.600,- yang dipergunakan untuk biaya cetak majalah akbar dan juga operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Pradya Suara. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 534.340.555,- atau 96,62%.
    - 2) Pelayanan Informasi Publik dengan alokasi dana sebesar Rp 111.295.500,- yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi

PPID. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 110.282.040,- atau 99,08%.

- 3) Layanan Hubungan Media dengan alokasi dana sebesar Rp 1.337.978.000,- yang dipergunakan untuk Pendokumentasian kegiatan kedinasan Pimpinan Daerah serta publikasi, belanja iklan di media massa dan untuk meliputi kegiatan Pimpinan Daerah serta pemeliharaan videotron Daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 1.288.834.362,- atau 96,32%.
- 4) Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dengan alokasi dana sebesar Rp 868.638.691,- yang dipergunakan untuk Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 867.990.850,- atau 99,92%.

2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan kegiatan:

- a. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan rincian sub kegiatan:
  1. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp 4.232.593.496,- yang dipergunakan untuk Pemeliharaan Jaringan TI seluruh OPD se Kabupaten Tuban. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 4.164.163.628,- atau 98,38%.
- b. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan rincian sub kegiatan:
  1. Fasilitasi penyelenggara SPBE di Lingkup Pemerintah Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp 41.949.000,- yang dipergunakan untuk menyusun Rencana Induk SPBE. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 17.797.800,- atau 42,43%
  2. Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintahan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp 22.934.354,- yang dipergunakan untuk Pengembangan sistem informasi Tuban Data Center

dan pengadaan server. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 18.672.500,- atau 81,42%.

3. Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi dengan alokasi dana sebesar Rp 91.776.875,- yang dipergunakan untuk mengintegrasikan aplikasi dengan realisasi keuangan sebesar Rp 90.571.500 atau 98,69%.
4. Koordinasi Penyusunan dan/ atau rivi u arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk penyusunan kerangka dasar penerapan SPBE
5. Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE dengan alokasi dana sebesar Rp 45.300.000,- yang dipergunakan untuk koordinasi pelaksanaan SPBE di lingkup Pemerintah Kabupaten Tuban. Adapun realisasi keuangan sebesar
6. Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk pembuatan aplikasi sesuai kebutuhan/permintaan OPD
7. Koordinasi Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah daerah yang dipergunakan untuk menyusun Rencana Induk SPBE
8. Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas yang dipergunakan untuk sosialisasi website desa dan produk Kominfo ke masyarakat
9. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota yang dipergunakan untuk Pemeliharaan Jaringan TI seluruh OPD se Kabupaten Tuban
10. Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang Terintegrasi yang dipergunakan untuk mengintegrasikan aplikasi
11. Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas yang dipergunakan untuk sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan TIK masyarakat.

Program dan kegiatan yang direalisasikan pada urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika pada tahun 2025 didukung alokasi anggaran sebagai berikut :

Tabel. 3.2.2  
Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan  
Informatika  
Tahun 2025

| No        | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                           | Anggaran (Rp.)          | Realisasi (Rp.)       | %             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>A</b>  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>            | <b>18.741.348.099</b>   | <b>17.280.510.701</b> | <b>92,21%</b> |
| <b>1.</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>      | <b>8.566.986.800,60</b> | <b>7.536.230.588</b>  | <b>87,97%</b> |
| <b>a.</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>92.275.200</b>       | <b>67.110.480</b>     | <b>72,73%</b> |
|           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | 76.342.700              | 54.673.980            | 71,62%        |
|           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | 15.932.500              | 12.436.500            | 78,06%        |
| <b>b.</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           | <b>6.463.256.797</b>    | <b>5.766.348.285</b>  | <b>89,22%</b> |
|           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       | 6.380.514.797           | 5.699.497.595         | 31 33%        |
|           | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                           | 62.400.000              | 46.800.000            | 75,00%        |
|           | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                               | 20.342.000              | 20.500.690            | 98,57%        |

|           |                                                                         |                         |                    |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| <b>c.</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        | <b>19.976.000</b>       | <b>19.660.000</b>  | <b>98,42%</b> |
|           | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                  | 976.000                 | 960.000            | 98,36%        |
|           | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi           | 19.000.000              | 18.700.000         | 98,42%        |
| <b>d.</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>529.056.749</b>      | <b>503.310.025</b> | <b>95,13%</b> |
|           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | 10.254.000              | 10.254.000         | 100%          |
|           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | 45.415.511              | 44.037.699         | 96,97%        |
|           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | 49.709.150              | 43.940.300         | 88,39%        |
|           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | 20.125.000              | 20.100.000         | 99,88%        |
|           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | 12.830.880              | 10.503.000         | 81,86%        |
|           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 79.746.951              | 74.804.000         | 93,80%        |
| <b>e.</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>379.107.975,58</b>   | <b>358.452.300</b> | <b>94,55%</b> |
|           | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | 379.107.975,58          | 358.452.300        | 94,55%        |
| <b>f.</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>1.128.887.975,02</b> | <b>891.264.842</b> | <b>78,95%</b> |
|           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1.481.500               | 1.429.700          | 96,50%        |
|           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | 311.054.133             | 208.349.850        | 66,98%        |

|           |                                                                                                                    |                         |                      |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|           | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | 58.772.752,02           | 39.040.250           | 66,43%        |
|           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 757.579.590             | 642.445.024          | 84,80%        |
| <b>g.</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>265.401.361</b>      | <b>229.755.700</b>   | <b>86,57%</b> |
|           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 66.213.566              | 61.456.700           | 92,82%        |
|           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 92.422.495              | 90.640.000           | 98,07%        |
|           | Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | 14.960.000              | 5.500.000            | 36,76%        |
|           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 91.805.300              | 72.159.000           | 78,60%        |
| <b>2.</b> | <b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>                                                                     | <b>2.007.904.317,40</b> | <b>1.954.722.929</b> | <b>97,55%</b> |
| <b>a.</b> | <b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                                | <b>2.007.904.317,40</b> | <b>1.954.722.929</b> | <b>97,55%</b> |
|           | Relasi Media                                                                                                       | 530.574.904             | 522.908.821          | 98,56%        |
|           | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat                                                         | 168.775.604             | 153.898.166          | 91,19%        |
|           | Pelayanan Informasi Publik                                                                                         | 156.955.218,40          | 155.449.837          | 99,04%        |
|           | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                                | 4.690.700               | 4.605.018            | 98,17%        |

|           |                                                                                                                         |                      |                      |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>3.</b> | <b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>                                                                                     | <b>5.796.611.234</b> | <b>5.689.094.885</b> | <b>98,15%</b> |
| <b>a.</b> | <b>Pengelolaan E-goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                                              | <b>5.796.611.234</b> | <b>5.689.094.885</b> | <b>98,15%</b> |
|           | Fasilitas penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda                                                                      | 41.949.000           | 17.797.800           | 42,43%        |
|           | Penyelenggara pusat kendali Pemerintah Daerah                                                                           | 22.934.354           | 18.672.500           | 81,42%        |
|           | Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi                                                                               | 91.776.875           | 90.571.500           | 98,69%        |
|           | Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah                                 | 45.300.000           | 3.918.000            | 8,65%         |
|           | Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE                                                                                   | 45.300.000           | 35.265.500           | 77,85%        |
|           | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah | 1.302.650.667,50     | 1.296.538.080        | 99,53%        |
|           | Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah                                                       | 24.745.400           | 2.396.000            | 9,68%         |
|           | Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas                                                    | 22.574.992           | 11.214.000           | 49,67%        |
|           | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota                                                               | 6.233.200.000        | 6.052.788.598        | 97,11%        |
|           | Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi                                             | 58.246.617           | 47.591.500           | 81,71%        |

|           |                                                                                               |                      |                    |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|
|           | Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas  | 24.144.893           | 11.065.506         | 45,83%        |
| <b>B.</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>                                                   | <b>192.516.570</b>   | <b>144.507.200</b> | <b>75,06%</b> |
| <b>1.</b> | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>                                             | <b>192.516.570</b>   | <b>144.507.200</b> | <b>75,06%</b> |
| <b>a.</b> | <b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>                    | <b>192.516.570</b>   | <b>144.507.200</b> | <b>75,06%</b> |
|           | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral                                          | 31.441.500           | 19.517.500         | 62,08%        |
|           | Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral                                                  | 19.547.500           | 13.703.500         | 71,10%        |
|           | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia             | 133.104.410          | 103.518.200        | 77,77%        |
|           | Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Sandar                                    | 8.423.160            | 7.768.000          | 92,22%        |
| <b>C.</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>                                                  | <b>61.117.612,50</b> | <b>57.231.000</b>  | <b>93,64%</b> |
| <b>1.</b> | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>                          | <b>61.117.612,50</b> | <b>57.231.000</b>  | <b>93,64%</b> |
| <b>a.</b> | <b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>61.117.612,50</b> | <b>57.231.000</b>  | <b>93,64%</b> |
|           | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi              | 52.875.500           | 49.881.500         | 94,34%        |

|  |                                                                                                                 |                       |                       |               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|  | Pemerintah Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                             |                       |                       |               |
|  | Pelaksanaan Keamanan<br>Informasi Pemerintah Daerah<br>Kabupaten/Kota Berbasis<br>Elektronik dan Non Elektronik | 8.245.112,50          | 7.349.500             | 89.14%        |
|  | <b>Jumlah</b>                                                                                                   | <b>18.741.348.099</b> | <b>17.280.510.701</b> | <b>92,21%</b> |

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kab.  
Tuban Tahun 2025*

Capaian kinerja pada tahun 2025 berdasarkan indikator sasaran, sebagai berikut :

Tabel 3.2.3

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

| No | Uraian Indikator Kinerja                                  | Satuan | Tahun 2025 |           |                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                           |        | Target     | Realisasi | Capaian                                                                                                                                                 |
| 1  | 2                                                         | 3      | 4          | 5         | 6                                                                                                                                                       |
| 1. | Indeks Pemdi / Pemerintah Digital (angka)                 | angka  | 4,29       | 4,24      | Nilai Relaisasi Indeks Pemdi tersebut adalah nilai capaian indeks SPBE tahun 2024, karena pada tahun 2025 tidak dilaksanakan penilaian oleh Kemenpan RB |
| 2. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (angka) | angka  | 89,89      |           |                                                                                                                                                         |

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kab.  
Tuban Tahun 2025*

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pemerintah Kab. Tuban dalam urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika adalah Tercapainya Peningkatan Kualitas Layanan di Bidang Komunikasi dan Informatika. Meningkatnya Pelayanan Informasi didukung oleh :

- 1) Prosentase informasi telah disampaikan kepada masyarakat
- 2) Persentase OPD yang memanfaatkan TIK untuk menunjang Administrasi Pembangunan
- 3) Cakupan pelayanan jaringan teknologi informatika

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban, isu strategis yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan Komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya Informasi palsu atau hoax yang beredar dimasyarakat;
2. Adanya system informasi / aplikasi yang tidak sesuai dengan standar dari DiskominfoSP

2) Solusi Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Menginisiasi pembentukan klinik hoax guna mengurangi berkembangnya informasi palsu di Masyarakat
2. Melaksanakan Verifikasi terhadap aplikasi ada sehingga memenuhi standar yang telah ditentukan sehingga dapat dilaksanakan pengintegrasian Sistem Informasi / aplikasi

2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

Penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar Statistik di Kabupaten Tuban dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pada Tahun 2025, diarahkan untuk pengembangan Sistem Informasi Data Statistik dan Dokumen Data Statistik Sektor sebagai pendukung perencanaan pembangunan daerah.

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Tuban melalui 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 370.257.150,- dan terealisasi sebesar Rp 271.315.486,- atau 73,27%, dengan indikator kinerja yaitu : Prosentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Adapun rincian program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut :

1. Program Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dengan kegiatan:

a. Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan rincian sub kegiatan:

- 1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektor dengan alokasi dana sebesar Rp 31.441.500,- yang dipergunakan untuk Pembinaan Desa Cinta Statistik yang bekerjasama dengan BPS Kab. Tuban. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 19.517.500,- atau 62,08%.
- 2) Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektor dengan alokasi dana sebesar Rp 19.547.500,- yang dipergunakan untuk meningkatkan Kualitas data statistik. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 13.703.500,- atau 71,10%.
- 3) Penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia dengan alokasi dana sebesar Rp 133.104.410,- yang dipergunakan untuk Jasa Konsultasi pengembangan Sistem Informasi Data Statistik Sektor. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 103.518.200,- atau 77,77%.

- 4) Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar dengan alokasi dana sebesar Rp 8.423.160,- yang dipergunakan untuk proses bisnis statistik. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 7.768.000,- atau 92,22%.

Program dan kegiatan yang direalisasikan pada urusan pemerintahan bidang statistik pada tahun 2025 didukung alokasi anggaran sebagai berikut :

Tabel. 3.2.4

Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2025

| <b>Perangkat Daerah/ Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>                     | <b>Anggaran (Rp)</b> | <b>Realisasi (Rp)</b> | <b>%</b>      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>                                       | <b>192.516.570</b>   | <b>144.507.200</b>    | <b>75,06</b>  |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>                                 | <b>192.516.570</b>   | <b>144.507.200</b>    | <b>75,06</b>  |
| <b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>        | <b>192.516.570</b>   | <b>144.507.200</b>    | <b>75,06%</b> |
| Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral                              | 31.441.500           | 19.517.500            | 62,08%        |
| Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral                                      | 19.547.500           | 13.703.500            | 71,10%        |
| Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia | 133.104.410          | 103.518.200           | 77,77%        |
| Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar                       | 8.423.160            | 7.768.000             | 92,22%        |

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Tuban Tahun 2025*

Capaian kinerja pada tahun 2025 berdasarkan indikator sasaran, sebagai berikut :

Tabel 3.2.5

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun  
2025

| No | Uraian Indikator Kinerja            | Satuan | Tahun 2025 |           |                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------|--------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                     |        | Target     | Realisasi | Capaian                                                                                                                                             |
| 1  | 2                                   | 3      | 3          | 4         | 5                                                                                                                                                   |
| 1. | Indeks Pembangunan Statistik (Poin) | poin   | 2,45       | 2,25      | Nilai Relaisasi Indeks Pembangunan Statistik tersebut adalah nilai capaian tahun 2024, karena pada tahun 2025 tidak dilaksanakan penilaian oleh BPS |

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Tuban Tahun 2025*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban urusan Pemerintahan Bidang Statistik tercapai dari target 75% terealisasi 95,24%. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik didukung oleh :

- 1) persentase OPD yang memanfaatkan aplikasi integrasi data
- 2) persentase elemen data dan informasi statistik yang terpublikasikan dan terupdate.

b. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban dalam urusan statistik adalah sebagai berikut :

- a. Banyaknya d Struktur data sektoral yang belum sesuai dengan standart data yang telah ditetapkan

- b. Belum adanya Pejabat Fungsional / setara eselon IV yang khusus menangani urusan Statistik Sektoral

## 2. Solusi Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi yang telah dilakukan antara lain :

- a. Melaksanakan verifikasi data sektoral yang telah dari masing – masing Perangkat Daerah agar sesuai dengan kebutuhan data
- b. Mengusulkan Pejabat Fungsional / setara eselon IV yang khusus menangani urusan Statistik Sektoral

## 3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

Penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar Persandian di Kabupaten Tuban dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Pada Tahun 2025, diarahkan untuk Peningkatan Sistem Informasi yang menerapkan Manajemen Keamanan Informasi.

### a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Tuban melalui 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 141.349.970,- dan terealisasi sebesar Rp 126.761.380,- atau 93,64%. Adapun rincian penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

- 1. Program Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dengan kegiatan:
  - a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan rincian sub kegiatan:
    - 1) Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp 52.875.500,- yang dipergunakan untuk Penyusunan Kebijakan tentang Keamanan informasi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 49.881.500,- atau 94,34%.

- 2) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik dengan alokasi dana sebesar Rp. 8.245.112,50,- penerbitan Tanda Tangan Elektronik serta mengintegrasikan Tanda Tangan Elektronik dengan aplikasi Pemerintah Daerah serta penanganan insiden serangan siber. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 7.349.500,- atau 89,14%.

Program dan kegiatan yang direalisasikan pada urusan pemerintahan bidang statistik pada tahun 2025 didukung alokasi anggaran sebagai berikut :

Tabel. 3.2.6

Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2025

| <b>Perangkat Daerah/Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>                                                       | <b>Anggaran (Rp)</b> | <b>Realisasi (Rp)</b> | <b>%</b>      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>                                                                      | <b>61.117.612,50</b> | <b>57.231.000</b>     | <b>93,64</b>  |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>                                              | <b>61.117.612,50</b> | <b>57.231.000</b>     | <b>93,64</b>  |
| <b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                     | <b>61.117.612,50</b> | <b>57.231.000</b>     | <b>93,64%</b> |
| Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 52.875.500           | 49.881.500            | 94,34%        |
| Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik            | 8.245.112,50         | 7.349.500             | 89.14%        |

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Tuban Tahun 2025*

a. Realisasi Indikator Kinerja Daerah

Capaian kinerja pada tahun 2025 berdasarkan indikator sasaran, sebagai berikut :

Tabel 3.2.7

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Tahun  
2025

| No | Uraian Indikator Kinerja                                    | Satuan | Tahun 2025 |           |          |
|----|-------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|----------|
|    |                                                             |        | Target     | Realisasi | Capaian  |
| 1  | 2                                                           | 3      | 4          | 5         | 6        |
| 1. | Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (%) | %      | 66,99      | 66,99     | Tercapai |

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Tuban Tahun 2025*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban urusan Pemerintahan Bidang Persandian tercapai dari target 66,99% terealisasi 66,99%.

b. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban dalam urusan statistik adalah sebagai berikut :

- a. Belum Optimalnya Penerapan Sitem Manajemen Keamanan Informasi
- b. Kurangnya sumber daya manusia di bidang pengelolaan persandian daerah

2. Solusi Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi yang telah dilakukan antara lain :

- a. Menyusun regulasi tentang penyelenggaraan keamanan informasi serta;
- b. Meningkatkan Keamanan Jaringan Tlk, Sistem Informasi dan Pusat Data;
- c. Mengusulkan Sumber Daya Aparatur yang berkompeten di Bidang persandian.

#### 4. PENUNJANG

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban Tahun 2025 yang meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diarahkan untuk Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah.

##### a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban melalui 1 (satu) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.628.940.068,00 dan terealisasi sebesar Rp 7.896.164.371,00 atau 91,50%. Adapun rincian penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

##### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan:

##### a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan rincian sub kegiatan:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp 36.384.400,- yang dipergunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 35.822.400,- atau 98,45%.
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp 30.967.500,- yang dipergunakan untuk penyusunan dokumen laporan pelaksanaan kegiatan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 30.233.500,- atau 97,62%.

##### b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan rincian sub kegiatan:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi dana sebesar Rp 5.896.822.947,- yang dipergunakan untuk

Pembayaran gaji dan tunjangan ASN. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 5.330.671.545,- atau 90,39%.

2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan alokasi dana sebesar Rp 51.600.000,- yang dipergunakan untuk Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 51.000.000,- atau 98,83%.

3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp 22.348.500,- yang dipergunakan untuk Belanja Lembur dan Belanja Benda Pos. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 22.173.011,- atau 94,74%.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan rincian sub kegiatan:

1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan alokasi dana sebesar Rp 38.182.905,- yang dipergunakan untuk bimbingan teknis implementasi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 37.268.000,- atau 97,60%.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan rincian sub kegiatan:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp 14.093.900,- yang dipergunakan untuk pemeliharaan instalasi listrik bangunan kantor. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 14.046.900,- atau 99,66%.

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp 290.579.169,- yang dipergunakan untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 274.029.695,- atau 94,30%.

3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp 54.752.980,- yang dipergunakan untuk belanja penyediaan makanan dan minuman pegawai, tamu dan rapat. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 51.782.200,- atau 94,57%.

- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi dana sebesar Rp 28.750.000,- yang dipergunakan untuk belanja cetak, dan pengadaan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 28.738.750,- atau 99,96%.
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp 137.522.000,- yang dipergunakan untuk Biaya perjalanan dinas. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 137.431.480,- atau 99,93%.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan rincian sub kegiatan:
  - 1) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp 500.000.000,- yang dipergunakan untuk pembangunan gedung(gudang). Adapun realisasi keuangan sebesar Rp492.907.440,- atau 98,58%.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan rincian sub kegiatan:
  - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi dana sebesar Rp 15.984.890,- yang dipergunakan untuk Benda Pos dan Belanja Paket/Pengiriman. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 15.334.500,- atau 95,93%.
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi dana sebesar Rp 341.455.900,- yang dipergunakan untuk pembayaran tagihan listrik, air dan telepon. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 291.661.070,- atau 85,41%.
  - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp 24.950.000,- yang dipergunakan untuk pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 24.614.000,- atau 98,65%.
  - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp 800.300.160,- yang dipergunakan untuk

Belanja Bahan Kimia dan Belanja Perabot Kantor. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 767.449.980,- atau 95,89%.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan rincian sub kegiatan:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi dana sebesar Rp 88.436.100,- yang dipergunakan untuk biaya pemeliharaan, sevice, bahan bakar serta pembayaran pajak kendaraan jabatan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 74.584.300,- atau 84,33%.
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi dana sebesar Rp 136.997.740,- yang dipergunakan untuk biaya pemeliharaan, sevice, bahan bakar serta pembayaran pajak kendaraan operasional. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 108.749.600,- atau 79,38%.
- 3) Pemeliharaan Mebel dengan alokasi dana sebesar Rp 14.960.000,- yang dipergunakan untuk biaya pemeliharaan mebel. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 14.945.000,- atau 99,89%.
- 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp 100.492.250,- yang dipergunakan untuk Pemeliharaan Gedung dan Mesin Lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 95.440.000,- atau 94,97%.

Program dan kegiatan yang direalisasikan pada Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota pada tahun 2025 didukung alokasi anggaran sebagai berikut :

Tabel. 3.2.8

Realisasi Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Kabupaten/Kota Tahun 2025

| <b>Perangkat Daerah/Nama<br/>Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>             | <b>Anggaran (Rp)</b>         | <b>Realisasi (Rp)</b>     | <b>%</b>      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN<br/>PEMERINTAHAN DAERAH<br/>KABUPATEN/ KOTA</b> | <b>8.566.986.800,6<br/>0</b> | <b>7.536.230.58<br/>8</b> | <b>87,97%</b> |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan<br/>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>92.275.200</b>            | <b>67.110.480</b>         | <b>72,73%</b> |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                          | 76.342.700                   | 54.673.980                | 71,62%        |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                           | 15.932.500                   | 12.436.500                | 78,06%        |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat<br/>Daerah</b>                           | <b>6.463.256.797</b>         | <b>5.766.348.28<br/>5</b> | <b>89,22%</b> |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                           | 6.380.514.797                | 5.699.497.595             | 89,33%        |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan<br>Tugas ASN                            | 62.400.000                   | 46.800.000                | 75,00%        |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi<br>SKPD                                | 20.342.000                   | 20.500.690                | 98,57%        |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat<br/>Daerah</b>                        | <b>19.976.000</b>            | <b>19.660.000</b>         | <b>98,42%</b> |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapannya                   | 976.000                      | 960.000                   | 98,36%        |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan Fungsi            | 19.000.000                   | 18.700.000                | 98,42%        |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                   | <b>529.056.749</b>           | <b>503.310.025</b>        | <b>95,13%</b> |
| Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor         | 10.254.000                   | 10.254.000                | 100%          |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan<br>Kantor                             | 45.415.511                   | 44.037.699                | 96,97%        |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                            | 49.709.150                   | 43.940.300                | 88,39%        |
| Penyediaan Barang Cetak dan<br>Penggandaan                                  | 20.125.000                   | 20.100.000                | 99,88%        |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan                 | 12.830.880                   | 10.503.000                | 81,86%        |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                     | 79.746.951                   | 74.804.000                | 93,80%        |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>379.107.975,58</b>        | <b>358.452.300</b>        | <b>94,55%</b> |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                       | 379.107.975,58               | 358.452.300               | 94,55%        |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>             | <b>1.128.887.975,0<br/>2</b> | <b>891.264.842</b>        | <b>78,95%</b> |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                              | 1.481.500                    | 1.429.700                 | 96,50%        |

| <b>Perangkat Daerah/ Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>                                                      | <b>Anggaran (Rp)</b> | <b>Realisasi (Rp)</b> | <b>%</b>      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 311.054.133          | 208.349.850           | 66,98%        |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | 58.772.752,02        | 39.040.250            | 66,43%        |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 757.579.590          | 642.445.024           | 84,80%        |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>265.401.361</b>   | <b>229.755.700</b>    | <b>86,57%</b> |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 66.213.566           | 61.456.700            | 92,82%        |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 92.422.495           | 90.640.000            | 98.07%        |
| Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | 14.960.000           | 5.500.000             | 36,76%        |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 91.805.300           | 72.159.000            | 78,60%        |

b. Realisasi Indikator Kinerja Daerah

Capaian kinerja pada tahun 2025 berdasarkan indikator sasaran, sebagai berikut :

Tabel 3.2.9

Capaian Indikator Kinerja Penunjang Tahun 2025

| <b>No</b> | <b>Uraian Indikator Kinerja</b>      | <b>Satuan</b> | <b>Tahun 2025</b> |                  |                |
|-----------|--------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|----------------|
|           |                                      |               | <b>Target</b>     | <b>Realisasi</b> | <b>Capaian</b> |
| <b>1</b>  | <b>2</b>                             | <b>3</b>      | <b>4</b>          | <b>5</b>         | <b>6</b>       |
| 1.        | Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah | point         | 81                | 80.60            | Belum Tercapai |

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Tuban Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban urusan Penunjang belum tercapai, dari target 81 point dengan realisasi sebesar 80.60 point.

c. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban dalam urusan penunjang adalah sebagai berikut :

- a. Perangkat daerah belum sepenuhnya memanfaatkan pohon kinerja dalam perencanaan kinerja.
- b. Rekomendasi perbaikan/strategi pencapaian atas target yang belum tercapai belum didetailkan.
- c. Belum terdapat mekanisme penanganan yang jelas jika terjadi kesalahan data saat pengumpulan data.

2. Solusi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi yang telah dilakukan antara lain :

- a. Melakukan pemanfaatan pohon kinerja perangkat daerah secara keseluruhan dan menuangkannya dalam dokumen perjanjian kinerja berjenjang.
- b. Menyajikan rekomendasi perbaikan/strategi detail atas upaya pencapaian target yang belum tercapai dalam rencana aksi sebagai salah satu bentuk pemantauan kinerja.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban, isu strategis yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan Komunikasi dan informatika, statistik dan persandian adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan sistem pemerintahan daerah;
2. Meningkatkan Pengelolaan Layanan Keamanan Informasi;
3. Menyediakan data Statistik Sektoral yang Valid dan Update;
4. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas pelayanan informasi publik.

Adapun dukungan rumusan kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana IT (Infrastruktur jaringan, database, aplikasi) untuk menerapkan kebijakan Bupati;
2. Menerapkan tren positif E-Government dan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai anggaran yang tersedia;
3. Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi secara Optimal;
4. Melaksanakan Pengolahan Data Statistik Sektoral yang sesuai Standar Data;
5. Meningkatkan Sistem layanan pengaduan masyarakat;
6. Memberikan Kepastian Tentang Kebenaran Informasi yang Beredar di Masyarakat;
7. Memberikan kemudahan dalam mengakses informasi publik yang Up To Date.

#### **4.2. Rekomendasi Tindak Lanjut**

Terhadap permasalahan-permasalahan yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban, maka tindak lanjut yang telah dilakukan antara lain:

1. Telah Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja berkala agar sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian strategi yang berdampak terhadap pencapaian kinerja;
2. Telah Memastikan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja tahun berjalan dievaluasi berdasarkan pengukuran kinerja;
3. Telah Melakukan reviu atas target dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen perencanaan;
4. Telah Menyusun dan mengimplementasikan mekanisme/SOP terkait penanganan jika terjadi kesalahan data saat pengumpulan data;
5. Telah mengoptimalkan pemanfaatan integrasi aplikasi sebagai upaya perbaikan perencanaan sampai dengan pemantauan kinerja berjenjang, baik pada kinerja level perangkat daerah maupun kinerja individu dengan memberikan informasi upaya/penyesuaian strategi dalam meningkatkan capaian kinerja berkala yang realisasinya belum mencapai target; dan
6. Melakukan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja tahun berjalan dievaluasi berdasarkan pengukuran kinerja.